

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KARYAWAN ALIH DAYA DI PT.  
ISS INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 13  
TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**

**Syaefullah**

**Abstrak**

Perkembangan ekonomi dan perkembangan teknologi berjalan begitu cepat sehingga berdampak pada persaingan yang sangat ketat sehingga menuntut perusahaan lebih mengutamakan tuntutan pasar yang menghendaki kecepatan dan respon yang fleksibel terhadap tuntutan pelanggan. Respon yang cepat terhadap tuntutan pasar dan pelanggan ini dapat menentukan kemenangan dan kekalahan dalam persaingan usaha. Oleh karena itu, demi efisiensi dan efektifitas perusahaan. Salah satu cara adalah dengan menyerahkan sebagian pekerjaan kepada pihak lain melalui jasa pemborongan atau penyedia jasa pekerja/buruh atau dikenal dengan istilah alih daya. praktek alih daya menimbulkan masalah, khususnya mengenai perlindungan pekerja/buruh. Umumnya, pekerja/buruh alih daya mendapatkan gaji yang lebih rendah. Jaminan sosial yang diterima minimal, dan bahkan pekerja/buruh alih daya dianggap sebagai faktor produksi. Ada pekerjaan, dipekerjakan oleh perusahaan, tidak ada pekerjaan di PHK. Tesis ini menganalisis apakah benar bahwa pekerja/buruh tersebut diperlakukan tidak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia dengan tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh Alih daya yang ditinjau dari sudut hukum ketenagakerjaan Indonesia, yakni UU Nomor 13 Tahun 2003. Metode penelitian ini didasarkan atas data yang terkumpul dari bahan-bahan pustaka (data sekunder) dan lapangan (data primer/data dasar). Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan topik yang dibahas berupa peraturan perundang-undangan, buku, makalah, hasil penelitian, jurnal, majalah, internet, dan sebagainya. Sedangkan data primer atau data dasar penulis dapat dari lapangan yaitu PT. ISS Indonesia. Data tersebut merupakan sumber utama bagi penulisan tesis ini, yang diperoleh dengan wawancara dan observasi. Dari hasil penelitian penulis menemukan bahwa tidak semua pelaksanaan praktek Alih daya merugikan pekerja/buruh Alih daya. Tergantung dari komitmen perusahaan penyedia jasa tersebut. Apakah perusahaan penyedia jasa alih daya tersebut menganggap karyawan sebagai aset atau sebaliknya. Sekalipun pelaksanaan Alih daya tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, namun banyak perusahaan penyedia jasa yang bertindak sewenang-sewenang.

**Kata Kunci** : Perlindungan Hukum, Pekerja Alih Daya

# **LEGAL PROTECTION FOR EMPLOYEES OUTSOURCING IN PT . ISS INDONESIA BY LAW - LAW NO . 13 OF 2003 CONCERNING EMPLOYMENT**

**Syaefullah**

## **Abstract**

Economic development and rapid technological developments have an impact on competition take place very strict and requires companies to give priority to the demands of the market that requires speed and flexible response to customer demands. Rapid response to market demands and customers can determine victory and defeat in competition. Therefore, these days' companies are concerned with things that speed up this process for the sake of efficiency and effectiveness of the company. One way is to outsource some of the work to another party through chartering services or service providers of workers / laborers or known as outsourcing. Due to the use of this power over the firm can pay more attention to the main activities of the company so that the company more competitive. However, the practices of outsourcing pose a problem, especially regarding the protection of workers/laborers. Generally, workers/labor outsourcing had lower salary, they received minimal social security, and even workers/labor outsourcing was considered as a factor of production. If there is work, they will be employed by the company; if there are no jobs they will b terminated.This thesis analyze whether it is true that the workers/laborers are treated in accordance with the dignity and dignity as human beings in the absence of legal certainty and legal protection for workers/laborers Sourcing the terms of the labor laws of Indonesia, namely Law No. 13 year 2003.Methods of this study are based on data collected from the materials library (secondary data) and field (primary data/data base). Secondary data were obtained through the study of literature, i.e. by collecting written materials related to the topics discussed in the form of legislation, books, papers, research, journals, magazines, internet, and so on. While the primary data or data base can author from the PT. ISS Indonesia. The data is the primary source for this thesis, which was obtained by interview and observation.From the results of the study, authors found that not all implementation Sourcing practices detrimental to workers/laborers Sourcing. Depending on the company's commitment to the service provider. Is outsourcing services company considers employees as assets or otherwise. Sourcing though implementation has been stipulated in the Employment Act, but many service providers who act summary or arbitrary. This is due to the vagueness of the formulation of the employment relationship between employers, service providers and workers / laborers Sourcing.

**Key Note :** Legal Protection, Labor Outsourcing